



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA DIBEE**

**PERATURAN DESA DIBEE
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN ANGGARAN 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA DIBEE**

**PERATURAN DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DIBEE,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
 14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
 16. Peraturan Desa Dibee Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 17. Peraturan Desa Dibee Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Keputusan BPD Desa Dibee Nomor : 188 / 01 / 413.321.6.1 / 2014 tentang Persetujuan Peraturan Desa Dibee Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA DIBEE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 828.182.300,-** (Delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 828.182.300,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 294.200.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 597.216.300,-

c. Pembiayaan

1) Penerimaan	Rp.	63.234.000,-
2) Pengeluaran	Rp.	63.234.000,-

Pasal 3

Uraian dari Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Dibee
Pada tanggal : 14 Mei 2014

KEPALA DESA DIBEE

SUPARTIN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	168,865,700	172,950,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	17,600,000	17,600,000	
1.1.1.1	Hasil Usaha PUAP	3,600,000	3,600,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Gardu Taskin	5,000,000	5,000,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha BUMDES Air Bersih	5,000,000	5,000,000	
1.1.1.4	Hasil Usaha UPK / SPP	2,000,000	2,000,000	
1.1.1.5	Hasil Usaha Sewa Handtraktor	2,000,000	2,000,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	82,000,000	84,000,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	20,000,000	20,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Desa Lainnya	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Kades / Perangkat Desa	49,000,000	49,000,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Desa @ 21.000.000,-	21,000,000	21,000,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Pemerintahan @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Trantib @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Ekbang @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Kesra @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Umum @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kasi Keuangan @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Dusun Dibee @ 4.900.000,-	4,900,000	4,900,000	BENGKOK
	~ Bengkok Kepala Dusun Pandanarang @ 5.100.000,-	5,100,000	5,100,000	BENGKOK
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes	10,000,000	10,000,000	
1.1.2.1.4	Kali / Telaga	1,000,000	1,000,000	
1.1.2.1.5	Air Bersih			
1.1.2.1.6	Tanah Pemukiman Desa Dibee			
1.1.2.1.7	Tanah Pemukiman Pandanarang			
1.1.2.1.8	HIPPA Desa		2,000,000	
1.1.2.1.9	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	38,815,700	35,900,000	
1.1.3.1	Swadaya KS @ Rp. 40.000,-	19,000,000	18,000,000	
1.1.3.2	Swadaya Penj Japordes dan ADD/Bansun @ Rp. 30.000,-	16,815,700	13,500,000	
1.1.3.3	Swadaya Sawah (Utk Masjid Dibee) 100 Ru Rp. 50.000,-	2,000,000	2,000,000	Luar Desa
1.1.3.4	Swadaya Penuj Masjid / Sawah 100 Ru Rp. 20.000,-			Dalam Desa
1.1.3.5	Partisipasi TP PKK			
1.1.3.6	Partisipasi Pengusaha Besar	1,000,000	2,400,000	

1	2	3	4	5
1.1.4	Hasil Gotong Royong	20,000,000	25,000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga	10,000,000	12,500,000	Masy
1.1.4.2	Nilai Natura	10,000,000	12,500,000	Masy
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	10,450,000	10,450,000	
1.1.5.1	Leges Administrasi Surat @ Rp. 10.000,-	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.2	Administrasi Surat Nikah / Biaya Nikah	2,200,000	2,200,000	
	~ Nikah Jam Dinas @ Rp. 350.000,-	700,000	700,000	Biaya tersebut untuk KUA dan Desa
	~ Nikah Luar Jam Dinas @ Rp. 400.000,-	1,200,000	1,200,000	
	~ Operasional P3N @ Rp. 50.000,-	100,000	100,000	
	~ Nikah Luar Desa @ Rp. 100.000,-	200,000	200,000	
1.1.5.3	Administrasi AKTA Tanah / Jual Beli	3,500,000	3,500,000	
	~ Luar Desa 6% dari harga jual	2,000,000	2,000,000	Luar Desa
	~ Dalam Desa 3% dari harga jual	1,500,000	1,500,000	Dalam Desa
1.1.5.4	Administrasi Ijin Keramaian	2,000,000	2,000,000	
	~ Sound System @ Rp. 50.000,-			
	~ Orkes/Ludruk/Tayuban/Elekton @ Rp. 250.000,-			
	~ Wayang Kulit @ Rp. 150.000,-			
1.1.5.5	Administrasi Jual Beli Hewan / Sawah Garapan	750,000	750,000	
	~ Jual beli temak @ Rp. 20.000,- / ekor			
	~ Sewa Sawah Garapan @ Rp. 20.000,- /100 Ru/Th			Dalam Desa
	~ Sewa Sawah Garapan @ Rp. 50.000,- /100 Ru/Th			Luar Desa
1.2	Bagi Hasil Pajak	1,482,300	1,232,300	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	250,000	250,000	
1.2.1.1	Insentif PBB (19.017.023 x 64,8 x 10%)	1,232,300	1,232,300	KAB
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	KAB
1.4.2	Bansun Dibeo	5,500,000	5,500,000	KAB
1.4.3	Bansun Pandanarang	5,500,000	5,500,000	KAB
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota dan Desa Lainnya	426,400,000	441,500,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	250,000,000	-	
1.5.1.1	PPIP	250,000,000		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	250,000,000	
1.5.2.1	Normalisasi Kali / Saluran Air		250,000,000	
				PROV
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	173,000,000	189,500,000	
1.5.3.1	Bantuan Penghasilan Tetap / Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	72,600,000	89,100,000	
	~ Kepala Desa @ Rp. 1.025.000 x 12 bln	10,200,000	12,300,000	KAB
	~ Perangkat Desa @ 800.000 x 12 bln x 8 org	62,400,000	76,800,000	KAB
1.5.3.2	Bantuan TPBPD BPD / per tahun	4,650,000	4,650,000	KAB
	Ketua Rp. 600.000			
	Wakil Ketua Rp. 550.000			
	Anggota @ Rp. 500.000 x 7 orang = Rp. 3.500.000			
1.5.3.3	Bantuan RT @ Rp. 250.000 x 14 org	3,500,000	3,500,000	KAB
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Jalan	75,000,000	75,000,000	
	~ Jalan Lingkungan Desa	30,000,000	30,000,000	KAB
	~ Jalan Poros Desa	45,000,000	45,000,000	PROV.
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Kepala Desa Rp. 1.000.000/th	5,000,000	5,000,000	KAB
1.5.3.6	Bantuan Puma Bhakti BPD @ Rp. 500.000	500,000	500,000	KAB

1	2	3	4
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	2,000,000	2,000,000 KAB
1.5.3.8	Bantuan Asuransi Kepala Desa Rp. 1.000.000 / th	1,000,000	1,000,000 KAB
1.5.3.9	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1,000,000	1,000,000 KAB
1.5.3.10	Bantuan Uang Duka Sekdes	750,000	750,000 KAB
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa	500,000	500,000 KAB
1.5.3.12	Bantuan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013	6,500,000	6,500,000 KAB
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	3,400,000	2,000,000
	~ Bantuan PilkaDes/Pengisian Perangkat Desa lainnya	1,000,000	2,000,000 PAD
	~ Tunj Kinerja Sekdes PNS (Rp. 200.000 x 12 bln)	2,400,000	- PAD
1.6	Hibah	60,000,000	60,000,000
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi (Pemb TPA)	50,000,000	50,000,000
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten / kota	-	-
1.6.4	Hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta	10,000,000	10,000,000
	~ Masjid Dibe dan Pand @ Rp. 5.000.000	10,000,000	10,000,000 KAB
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat / perorangan	-	-
	~ Handtraktor		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	31,000,000	100,000,000
1.7.1	Sumbangan dari Keluarga Calon Kepala Desa / Perangkat Desa lainnya (Kasun) @ 50.000.000,-	30,000,000	100,000,000 Calon Kasun
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha	1,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	740,248,000	828,182,300
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)	295,200,000	294,200,000
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	13,400,000	13,400,000
2.1.1.1	Honorarium Panitia (PHBN / Ag)	1,000,000	1,000,000 PAD
2.1.1.2	Honorarium / Insentif BPD	3,000,000	3,000,000 Berdasarkan
2.1.1.3	Honorarium / Insentif LPM	1,000,000	1,000,000 Tgkt kehadiran
2.1.1.4	Honorarium / Insentif RT/RW @ Rp. 150.000	2,850,000	2,850,000 rapat / PAD
2.1.1.5	Honorarium / Insentif P3N	200,000	200,000 PAD
2.1.1.6	Honorarium / Insentif Jogo Tirta / Kader Tani	200,000	200,000 PAD
2.1.1.7	Honorarium / Insentif PKBD	250,000	250,000 PAD
2.1.1.8	Honorarium Petugas (LINMAS)	1,400,000	1,400,000 PAD
2.1.1.9	Honorarium Petugas Pemungut PBB @ Rp. 250.000	500,000	500,000 PAD
2.1.1.10	Honorarium TIM Panitia Desa	2,000,000	2,000,000
2.1.1.11	Honorarium Petugas Pemungut SWD (5%)	1,000,000	1,000,000
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	223,800,000	219,800,000 PAD
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	11,550,000	11,550,000
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat	8,550,000	8,550,000 PAD
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas BPD, LPM, KPMD	1,500,000	1,500,000
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas (KAMTIBMAS)	1,500,000	1,500,000

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	212,250,000	208,250,000	
2.1.2.2.1	Belanja Pengadaan Struktur	3,000,000	3,000,000	PAD
2.1.2.2.2	Belanja Pemeliharaan Kantor Desa/Kec	5,000,000	5,000,000	PAD
2.1.2.2.3	Belanja Kegiatan PHBN	15,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.4	Belanja Pengadaan Papan Nama	3,000,000	3,000,000	PAD
2.1.2.2.5	Belanja Pengadaan Speaker Desa			
2.1.2.2.6	Belanja Pengadaan Taman Bunga dan Parkir			
2.1.2.2.7	Belanja Puma Bhakti Kades, Perangkat, BPD	4,300,000	4,300,000	PAD
2.1.2.2.8	Belanja ATK	2,250,000	2,250,000	PAD
2.1.2.2.9	Belanja Rekening Listrik	700,000	700,000	PAD
2.1.2.2.10	Belanja Pembuatan Perdes, Kep Kades, Kepdes	1,750,000	1,750,000	PAD
2.1.2.2.11	Belanja Pengukuran Sawah/Normalisasi Kali	5,000,000	15,000,000	PAD
2.1.2.2.12	Belanja Pembuatan Profil Desa	1,250,000	1,250,000	PAD
2.1.2.2.13	Belanja Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas 2 (Dua)	1,500,000	1,500,000	PAD
2.1.2.2.14	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR) Pempdes	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.15	Belanja Rapat Desa / Musyawarah Desa	11,000,000	7,000,000	
2.1.2.2.16	Belanja Bahan / Material ADD			KAB
	~ Gapura Masuk Desa RT. 05	41,500,000	41,500,000	
2.1.2.2.17	Belanja Bahan / Material 2 Bansun	11,000,000	11,000,000	KAB
	~ Pagar Kuburan Desa			
	~ Rabat Jalan Pulo Dusun Pandanarang			
2.1.2.2.18	Belanja Material Jalan Poros	45,000,000	45,000,000	PROV.
2.1.2.2.19	Belanja Material Pembangunan Gapura			
2.1.2.2.20	Belanja Material Pembangunan TPA / TPQ	50,000,000	50,000,000	
2.1.2.2.21	Belanja Material Pembangunan Kantor Lembaga			
2.1.2.2.22	Belanja Konsumsi Rapat / Musrenbang Desa	6,000,000	6,000,000	PAD
2.1.3	Belanja Modal	58,000,000	61,000,000	
2.1.3.1.1	Belanja Modal Tanah	6,000,000	6,000,000	PAD
2.1.3.1.2	Belanja Modal / Membeli Komputer	3,000,000	3,000,000	
2.1.3.1.3	Instalasi Listrik Kantor Desa			
2.1.3.1.4	Instalasi Bio Gas			
2.1.3.1.5	Belanja Modal Meubeler (Meja, Kursi, Almari)			
2.1.3.1.6	Belanja Kursi / Rapat	2,500,000	2,500,000	
2.1.3.1.7	Belanja Almari / Arsip	4,500,000	4,500,000	PAD
2.1.3.1.8	Belanja Modal Gedung / Jalan / Saluran			
2.1.3.1.9	Belanja Renovasi Kantor	10,000,000	10,000,000	PAD
2.1.3.1.10	Belanja Tan. Penghijauan	2,000,000	2,000,000	PAD
2.1.3.1.11	Belanja Rehab Masjid Dibe	10,000,000	10,000,000	PAD
2.1.3.1.12	Belanja Pengurukan Kali Kuburan Dibe	2,500,000	2,500,000	
2.1.3.1.13	Belanja Rahab balai Dusun Pandanarang / Krapyak	3,000,000	3,000,000	PAD
2.1.3.1.14	Belanja Pengadaan Kantor UPK			
2.1.3.1.15	Belanja Pengadaan Patok Tanah / Batas	1,500,000	4,500,000	PAD
2.1.3.1.16	Belanja Jembatan			
2.1.3.1.17	Belanja Kantor Desa / Perlengkapan Kantor	5,000,000	5,000,000	PAD
2.1.3.1.18	Belanja Modal Beli Laptop	6,000,000	6,000,000	
2.1.3.1.19	Belanja Pemeliharaan Komputer / Service	2,000,000	2,000,000	PAD

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung	508,282,000	597,216,300	
	(2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	150,400,000	149,500,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa	21,000,000	21,000,000	BENGKOK
	~ Bengkong Kepala Desa @ 21.000.000,-			
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	129,400,000	128,500,000	
2.2.1.2.1	Belanja Hasil Sewa Bengkong Perangkat Desa Lainnya	28,000,000	28,000,000	
	~ Bengkong Kasi Pemerintahan @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkong Kasi Trantib @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkong Kasi Ekbang @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkong Kasi Kesra @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkong Kasi Umum @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkong Kasi Keuangan @ 3.000.000,-	3,000,000	3,000,000	BENGKOK
	~ Bengkong Kepala Dusun Dibee @ 4.900.000,-	4,900,000	4,900,000	BENGKOK
	~ Bengkong Kepala Dusun Pandanarang @ 5.100.000,-	5,100,000	5,100,000	BENGKOK
2.2.1.2.2	TPAPD Kepala Desa			KAB
	~ Kepala Desa @ Rp. 1.025.000 x 12 bln	10,200,000	12,300,000	
2.2.1.2.3	Bantuan Dana Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	KAB
2.2.1.2.4	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	2,400,000		PAD
2.2.1.2.5	TPAPD Kasun Dibee (Rp. 800.000 x 12 bln)	7,800,000	9,600,000	KAB
2.2.1.2.6	TPAPD Kasun Pandanarang (Rp. 800.000 x 12 bln)	7,800,000	9,600,000	KAB
2.2.1.2.7	TPAPD Kasi / Kaur (Rp. 800.000 x 12 bln x 6 org)	46,800,000	57,600,000	KAB
2.2.1.2.8	Belanja Peg / Penghasilan Tetap BPD			
	Tunjangan BPD	4,650,000	4,650,000	KAB
	~ Ketua BPD Rp. 600.000			
	~ Wakil Ketua Rp. 550.000			
	~ Anggota @ Rp. 500.000			
2.2.1.2.9	Belanja / Tunjangan RT @ Rp. 250.000	3,500,000	3,500,000	KAB
2.2.1.2.10	Bantuan Pilkades Tahun 2013	6,500,000	-	KAB
2.2.1.2.11	Bantuan Puma Bhakti Kepala Desa	5,000,000	-	KAB
2.2.1.2.12	Bantuan Puma Bhakti BPD @ Rp. 500.000	500,000	-	KAB
2.2.1.2.13	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa Lainnya	2,000,000	-	KAB
2.2.1.2.14	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	KAB
2.2.1.2.15	Bantuan Uang Duka Sekdes	750,000	750,000	KAB
2.2.1.2.16	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa	500,000	500,000	KAB
2.2.1.2.17	Belanja Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013	1,000,000	-	PAD

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah	290,000,000	300,000,000	
2.2.2.1	Belanja Hibah Dari Pemerintah Pusat	250,000,000		
	PIIP	250,000,000		
2.2.2.2	Belanja Hibah Dari Pemerintah Provinsi	-	250,000,000	
	~ Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
	~ Normalisasi Kali / Saluran Air		250,000,000	PROV.
2.2.2.3	Belanja Hibah dari Kabupaten / Kota	40,000,000	50,000,000	
2.2.2.3.1	GUMERLAP (Itik)			
2.2.2.3.2	Pembangunan Jalan Desa	30,000,000	40,000,000	KAB
2.2.2.3.3	Pembangunan Kantor / Lembaga Desa			
2.2.2.3.4	Lanjutan Pemb. Pagar dan Gapura			
2.2.2.3.5	Lanjutan Pemb. Pagar Kuburan			
2.2.2.3.6	Pemb. Jalan Rabat Dusun Pand. / Jln. Polo			
2.2.2.3.7	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta			
	~ Masjid Desa Dibee dan Pand @ Rp. 5.000.000	10,000,000	10,000,000	PAD
	~ Musholla 2 @ Rp. 4.000.000			
	~ Karang Taruna			
2.2.2.3.8	Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan			
	~ Handtraktor			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	11,200,000	11,200,000	
2.2.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / TK	400,000	400,000	PAD
2.2.3.2	Belanja Kegiatan PHBN / PHBI	3,000,000	3,000,000	PAD
2.2.3.3	Basis	500,000	500,000	PAD
2.2.3.4	Anak Asuh	200,000	200,000	PAD
2.2.3.5	TPQ	600,000	600,000	PAD
2.2.3.6	Pembinaan Linmas	500,000	500,000	PAD
2.2.3.7	Pembinaan Perangkat Desa	2,500,000	2,500,000	PAD
2.2.3.8	Perlombaan Desa	2,500,000	2,500,000	PAD
2.2.3.9	Kegiatan Bersih Desa	1,000,000	1,000,000	PAD
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,450,000	12,450,000	
2.2.4.1	Belanja Operasional Pemerintah Desa	3,450,000	3,450,000	ADD
	~ Biaya Cetak dan Penggandaan	200,000	200,000	ADD
	~ Biaya Rapat	300,000	300,000	ADD
	~ Biaya Transport PJOK	960,000	960,000	ADD
	~ Biaya Operasional PJOK / PJAK	1,190,000	1,190,000	ADD
	~ Biaya Orientasi PJOK	300,000	300,000	ADD
	~ Biaya Operasional Linmas	500,000	500,000	ADD
2.2.4.2	Biaya Adm, Kehormatan BPD	2,500,000	2,500,000	ADD
2.2.4.3	Belanja Adm, Kehormatan LPM	2,000,000	2,000,000	ADD
2.2.4.4	Belanja Adm, PKK / Meja, Almari, Kursi	3,000,000	3,000,000	ADD
2.2.4.5	Belanja Pemuda	1,000,000	1,000,000	ADD
2.2.4.6	Belanja Posyandu	500,000	500,000	ADD
2.2.5	Sumbangan dari Pihak Ketiga	40,000,000	120,000,000	
2.2.5.1	Pengisian Kasun (2 Kasun @ 50.000.000)	30,000,000	100,000,000	
2.2.5.2	Belanja Kegiatan Gotong Royong / Tenaga / Natura	10,000,000	20,000,000	
2.2.6	Belanja Tak Terduga	4,232,000	4,066,300	
2.2.6.1	Belanja Keadaan Darurat	3,232,000	3,066,300	PAD
2.2.6.2	Bencana alam	1,000,000	1,000,000	PAD
	JUMLAH BELANJA	803,482,000	891,416,300	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN	-	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	63,234,000	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	63,234,000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	63,234,000	63,234,000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-		
3.2.3	Pembayaran Utang	-		
3.2.4	Sisa Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya	63,234,000	63,234,000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)			

Dibee, 14 Mei 2014
KEPALA DESA DIBEE



SUPARTIN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188/ 01 / 413.321.6 .1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA DIBEE TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Dibee tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Dibee Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Dibee membahas Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee tahun anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIBEE TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee tahun anggran 2014

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Dibee
Pada tanggal 14 Mei 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEE
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DIBEE KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG PENGESAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor : 188 / 01 / 413.321.6.1 / 2014

Pada hari ini jumat, tanggal dua puluh empat, bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Dibee Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Dibee perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Dibee mengadakan rapat membahas perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Dibee menyatakan **menyetujui** peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dibee Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Dibee

1. SUHARNO, SE
Ketua

1.

2. MARKADI
Wk Ketua

2.

3. AFAN ZAKARIYAH
Sekretaris

3.

4. SRI ULTUM, S.Pd
Anggota

4.

5. MISDI
Anggota

5.

6. MOH SUYADIONO
Anggota

6.

7. NGATMU
Anggota

7.

8. WIYADI
Anggota

8.

9. SUTRIMO
Anggota

9.